

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Mukthie Fadjar dan Tim Penyusun, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Achmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016)
- Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016)
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, (Rome: June, 2001)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture*, (Rome, 2012)
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012).
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, second edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003)
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, (Santa Barbara, Greenwood Publishing, 2004).
- RR. Churchill dan AV. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, (United Kingdom: Manchester University Press, 1999)
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Sam Suhaedi Admawiria, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1968).
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.

- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.hlm. 145
- Tanty S Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut terhadap *Illegal Fishing*”, *Kertas Kerja*, Mei 2015.
- Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

2. JURNAL/MAJALAH/ARTIKEL

- Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 8, (Mei 2012).
- Bondaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish*, (2015).
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, “Kerja Nyata Pengawas Mewujudkan Kedaulatan”, *Warta Pengawasan*, Edisi 1, (2017).
- Flora Libra Yanti, “Hukum Penyelundupan: Gagalnya Penyelundupan Melalui Laut”, *Majalah GATRA*, Edisi No. 46 Vol. XXII, (September 2016).

Handout: *Simulasi Efektivitas Tata Kelola Perikanan di WPP NRI, "Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan"*, Power Point.

Harkristuti Harkrisnowo, "*News letter* Komisi Hukum Nasional", *Komisi Hukum Nasional*, (Jakarta, Mei 2002).

Harkristuti Harkrisnowo, "*Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*", *Indonesian Journal of Internasional*, Edisi No. 2 Vol. 1, (Januari 2004).

Khopiatuziadah, "*Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan kedua Undang-Undang tentang Perikanan*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017.

Komite Perikanan, "*Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tanpa Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan. Langkah-langkah Pelabuhan pada Negara dan sarana lainnya*", (2007), Translated by FAO, (Committee on Fisheries, "Combating illegal, unreported and unregulated fishing through monitoring, control and surveillance. Port State measures and other means", (2007).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan International Organization for Migration, "*Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*", (Jakarta, 2016).

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, oleh Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Disampaikan Pada Rekreasi KKP Tahun 2017, Jakarta, 19 Januari 2017.

1. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Jenewa, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen).

Jenewa, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resource of the*

High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas).

Rome, *Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, June, 2001.

Rome, *Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture*, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. INTERNET

Alif Kholifah, “Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia”, dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, akses 16 Agustus 2018.

FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep, diakses tanggal 16 Agustus 2018.

FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, 2012, lihat www.fao.org/icalog/inter-e.htm, diakses 16 Agustus 2018.

FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, 2012, lihat www.fao.org/icalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2353332/dalam-setahun-menteri-susi-tenggelamkan-106-kapal-pencuri-ikan>, “Dalam Setahun, Menteri Susi Tenggelamkan 106 Kapal Pencuri Ikan”.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2405276/57-kapal-maling-ikan-siap-dibom-di-2016> “57 Kapal Maling Ikan Siap Dibom di 2016”, Akses 14 Januari 2018.

Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/t>

[he-case-for-inclusive-green-growth](#), Akses 16 Agustus 2018.

Wahyu Nugroho, “Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di WPPRI”, <http://id.portalgaruda.org>, di akses tanggal 23 Januari, 2018)